

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA

POLICY IMPLEMENTATION OF REGION WITHOUT CIGARETTE IN YOGYAKARTA CITY

Oleh : Reza Monica dan Argo Pambudi, M.Si, Universitas Negeri Yogyakarta,
monicareza36@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta serta mengetahui dan memahami faktor penghambat dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan guna membantu memecahkan masalah yang terjadi terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Desain ini dinilai tepat untuk menggambarkan serta mendeskripsikan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode. Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Proses komunikasi dilakukan dengan sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok. Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok telah didukung oleh sumber daya yang memadai. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut kurang didukung dengan komitmen dari pelaksana kebijakan dan SOP yang mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya sumber daya yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya lebih kepada sulitnya mengubah kebiasaan merokok, mudahnya mendapat rokok, kurangnya komitmen dari implementor dan tidak adanya SOP.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kawasan tanpa rokok

Abstract

The purpose of this research was to know and understand the policy implementation of region without cigarettes in the Yogyakarta city as well as to know and understand the inhibiting factors of policy implementation of region without cigarettes in the Yogyakarta city. This research was important to help resolve problems related of policy implementation region without cigarettes in Yogyakarta city. This study used descriptive qualitative method. This design was considered appropriate to illustrate and describe the policy implementation of region without cigarette in Yogyakarta city. Data collected by interview and observation. Data validity checking was done by triangulation method. The process of data analysis included data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the policy implementation of region without cigarette in the Yogyakarta city has been performed in accordance with the provisions. The process of communication is done with socialization and installation of signs prohibiting smoking. Policy implementation of region without cigarettes's has been supported by adequate resources. However, in the implementation of these policies were less supported by the commitment of implementing policies and SOP's that support policy implementation region without cigarettes in the Yogyakarta city. Supporting factor in the implementation was the adequate resources. Inhibiting factors were difficult to change the habit of smoking, easy to got cigarettes, a lack of commitment from the implementers and there is no SOP.

Keywords: Policy implementation, Region without cigarettes

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Alasan Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan tersebut karena masalah rokok merupakan penyebab tertingginya kematian yang disebabkan oleh penyakit *cardiovaskuler* (CVD) seperti penyakit stroke dan jantung. Hal tersebut merupakan hasil *survey* pada tahun 2005 berdasarkan laporan dari berbagai rumah sakit yang ada di Provinsi Yogyakarta. Pemicu dari penyakit *cardiovaskuler* (CVD) berasal dari konsumsi tembakau yang tinggi dan menjadi prediktor kuat tingginya kasus CVD dan hasilnya menunjukkan bahwa 56% keluarga di Kota Yogyakarta adalah keluarga perokok (Fitri, 2014). Jumlah perokok pemula di Kota Yogyakarta yang berusia 5-9 tahun mencapai 7.14 %. Kekhawatiran yang muncul adalah resiko timbulnya penyakit akibat merokok dapat menyerang masyarakat pada usia muda (dikutip dari daerah.sindonews.com pada 17 Oktober 2016).

Sejak ditetapkan dari tahun 2015, kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta masih menjumpai berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satunya ketika di awal pelaksanaan kebijakan tersebut pernah mengalami penundaan. Hal ini dikarenakan tidak

adanya kesiapan di lapangan bahkan sosialisasi pada kawasan tanpa rokok belum menyeluruh dilakukan.

Selain itu dari Hasil *Survey* Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa masih ditemukannya perokok di lokasi yang merupakan kawasan tanpa rokok.

Tabel 1. Hasil survei Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada Kawasan Tanpa Rokok di Kelurahan dan Puskesmas di Kota Yogyakarta tahun 2015

No	Indikator	Hasil	
		Ya	Tidak
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung	15	39
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung	10	44
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk	35	19
4	Tercium bau asap rokok	15	39
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung	9	45
6	Ditemukan putung rokok di dalam gedung	7	47
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, <i>billboard</i> , dll)	3	51
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung kawasan tanpa rokok	7	47

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2015.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih adanya masyarakat yang tidak menaati kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Padahal dalam kebijakan kawasan tanpa rokok sudah jelas mengatur bahwa dalam kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, menerima promosi atau sponsor rokok.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta”. Hal ini penting dilakukan karena akan memberikan gambaran nyata mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk menyelesaikan masalah terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu penelitian ini juga dilakukan sebagai tugas akhir peneliti dan hasil dari penelitian ini dibuat sebagai artikel yang dipublikasikan dalam bentuk *e-journal*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori George Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan. Teori George Edward III menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel.

Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Subarsono, 2013:90). Keempat variabel tersebut dirasa paling tepat untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Hal ini karena Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dapat dilaksanakan secara optimal apabila diawali dengan proses pengkomunikasian kebijakan kawasan tanpa rokok. Untuk menjalankannya juga diperlukan sumber daya baik manusia maupun finansial. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok perlu memiliki disposisi atau komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu diperlukan struktur birokrasi yang kaya fungsi agar dapat mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok secara optimal.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007:4). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena desain deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di Kota Yogyakarta secara lebih mendalam.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kota Yogyakarta dan dilakukan dari bulan November 2016 hingga bulan Februari 2017.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Bapak Tri Mardoyo, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
2. Bapak Drs. Satrio Budi Santoso. Sekretaris TP UKS Kota Yogyakarta dan Tim KTR Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
3. Bapak Jarot Subakti, M.Psi, P. Si. Penanggung Jawab Klinik Berhenti Merokok
4. Bapak Drs. ST. Totok Suryonoto, M.S.i. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
5. Bapak Andi. Pengunjung Puskesmas Mergangsan.
6. Bapak Rohmat. Sopir Bus TransJogja.
7. Ibu Lusi. Pegawai Dinas Kesehatan bagian Promkes dan SIK Kota Yogyakarta.

8. Ibu Levy. Wali Murid SDN Lempuyanganwangi Kota Yogyakarta.

9. Sakti. Pengunjung RSUP Dr. Sardjito

Prosedur

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui metode wawancara semi terstruktur. Metode ini dilakukan dengan cara membuat garis besar apa yang akan ditanyakan yang akan dikembangkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian *non partisipatif observasion* dilakukan dengan cara mengamati apa yang senyatanya ada dilapangan tanpa harus mengikuti langsung kegiatan yang dilakukan informan. Selanjutnya teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis informasi dari dokumen atau catatan penting. Seperti kebijakan pemerintah, laporan, berita.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari internet, buku, laporan hasil survei oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi serta dokumen-dokumen yang di dapatkan dari data sekunder.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi metode. Peneliti melakukan triangulasi metode. Peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dengan data observasi serta dokumentasi. Setelah itu peneliti membandingkan ketiga data tersebut yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana Impelementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Milles dan Huberman (1984). Teknik ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2011: 246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta dilihat dari empat variabel menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

a. Komunikasi

Proses komunikasi dilakukan dengan cara sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik dengan masyarakat maupun dengan badan atau usaha yang lokasi nya termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dengan mengkomunikasikan apa isi kebijakan kawasan tanpa rokok. Tetapi juga dengan mensosialisasikan dampak buruk rokok bagi perokok pasif maupun perokok aktif.

Selanjutnya, pemasangan tanda larangan merokok dilakukan pada setiap lokasi yang merupakan kawasan tanpa rokok. Berikut tanda kawasan tanpa rokok:



Gambar 1. Tanda Larangan Merokok di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Sumber : dokumen pribadi peneliti.

Dalam gambar tersebut dijelaskan di dalam kawasan tanpa rokok tidak diperbolehkan untuk merokok, memperjualbelikan rokok, mengiklankan rokok dan menerima sponsor atau promosi rokok.

Dapat dikatakan keberhasilan dari indikator komunikasi ini adalah bahwa sudah terlaksananya proses komunikasi itu sendiri. Sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok, lokasi larangan

merokok dan bahaya merokok itu sendiri. Hanya saja walaupun komunikasi sudah dilakukan, masih terdapat pelaksana kebijakan yang masih merokok di kawasan tanpa rokok.

Proses komunikasi belum begitu berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut karena walaupun pemerintah sudah gencar melakukan sosialisasi dan pemasangan tanda kawasan tanpa rokok, tetapi masih ditemukan perokok di kawasan tanpa rokok. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan di atas, variabel komunikasi belum sepenuhnya berpengaruh dalam mendukung terlaksananya kebijakan kawasan tanpa rokok secara optimal.

b. Sumber daya

Sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.

Dalam hal sumber daya manusia, Pemerintah Kota

Yogyakarta membuat Tim Monitoring dan Evaluasi dari kebijakan tersebut. Tim tersebut beranggotakan seluruh SKPD yang ada di Kota Yogyakarta. Pembuatan tim tersebut dapat dikatakan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini karena sebelum dibentuknya tim ini kegiatan evaluasi dilakukan oleh pengelola lokasi yang merupakan kawasan tanpa rokok itu sendiri. Dan hasil yang didapatkan selalu baik. Setelah adanya tim tersebut, proses evaluasi dilakukan secara acak. Sehingga penilaian dapat dilakukan lebih detail dan lebih baik.

Kemudian sumber daya anggaran dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta seluruhnya berasal dari APBD. Anggaran dirasa sudah memadai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi, pemasangan tanda larangan merokok dan membuat fasilitas yang merupakan lokasi khusus untuk merokok.

c. Disposisi

Menurut Edward III disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dari implementor dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok.

Dalam hal disposisi menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya pelaksana kebijakan yang merokok di lokasi yang merupakan Kawasan Tanpa rokok.

Ketidakberhasilan dari indikator disposisi terlihat dari masih adanya pelaksana kebijakan yang merokok pada kawasan tanpa rokok. Dalam hal ini, disposisi yang merupakan komitmen dari pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan hal ini karena disposisi mempengaruhi sikap pelaksana kebijakan baik mendukung maupun tidak mendukung kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok hal ini karena masih kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan untuk menaati kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selaku penanggung jawab dari kebijakan kawasan tanpa rokok tidak rumit. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai struktur organisasi yang tidak panjang, tidak rumit dan sangat jelas. Selain itu, struktur birokrasi dapat dilihat dari ada atau tidaknya SOP. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta belum mempunyai SOP. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan variabel struktur birokrasi belum sepenuhnya berhasil karena belum adanya SOP yang mendukung dari implementasi kebijakan tersebut.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok diantaranya:

- a. Sulitnya mengubah kebiasaan merokok.

Merokok telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat. Budaya merokok tidak terlepas dari rasa “turun temurun”. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa banyak perokok pemula yang merasa bahwa kebiasaan merokok timbul karena orang tua juga merokok.

- b. Mudahnya mendapatkan rokok

Mudahnya untuk mendapatkan rokok membuat masyarakat di segala usia dapat dengan mudah membeli rokok dimana saja dan kapan saja. Bahkan pedagang rokok mulai dari pedagang kecil hingga toko besar juga mudah dijumpai dan terletak berdekatan dengan kawasan tanpa rokok.

- c. Maraknya iklan rokok

Iklan rokok seringkali di ilustrasikan dengan laki-laki yang tampak beriwibawa dengan didampingi wanita. Hal

tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang kemudian tertarik untuk membeli rokok.

d. Tidak adanya SOP

Tidak adanya SOP dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok juga merupakan faktor penghambat. Hal tersebut karena membuat masyarakat tidak mengetahui kemana dan bagaimana cara melapor jika melihat orang yang merokok bahkan bagaimana cara menindaklanjuti laporan tersebut.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dianggap sebagai salah satu upaya persuasif dalam mengatasi naiknya jumlah perokok. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan kawasan tanpa rokok melainkan tentang dampak buruk dari merokok.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sosialisasi dapat efektif untuk mencegah naiknya jumlah perokok. Hal tersebut karena sosialisasi dilakukan secara terus menerus sehingga membuat masyarakat sadar akan bahaya dan kebijakan rokok itu sendiri.

b. Progam Klinik Berhenti Merokok

Pada klinik berhenti merokok masyarakat dapat berkonsultasi mengenai bagaimana cara berhenti merokok, keuntungan berhenti merokok. Klinik berhenti merokok tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Yogyakarta.

Klinik berhenti merokok dirasa tepat karena pendekatan yang dilakukan di klinik berhenti merokok lebih kepada pendekatan personal. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih nyaman karena dengan pendekatan personal masyarakat dapat menjamin kerahasiaan mengenai apa yang mereka konsultasikan.

c. Progam RW / Kampung Bebas Asap Rokok

Progam RW/ Kampung Bebas Asap Rokok menjadi salah satu progam unggulan dari pemerintah. Progam ini merupakan deklarasi dari masyarakat sendiri di tingkat RW. Pemerintah dalam hal ini hanya mengawasi dan memberi bimbingan terhadap RW yang sudah mendeklarasikan Kampung Bebas Asap Rokok. Bentuk deklrasi Bebas Asap Rokok biasanya larangan merokok di dalam rumah, di pertemuan warga dan didekat anak kecil.

Berdasarkan hal tersebut progam ini dirasa menjadi progam yang tepat untuk menyukseskan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Hal ini karena progam ini merupakan progam yang terwujud karena keinginan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat tanpa rokok.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta, peneliti menyimpulkan:

1. Variabel komunikasi belum dapat mencapai sasaran hal tersebut dapat dilihat dari walaupun sudah ada sosialisasi dan tanda larangan merokok tetapi masih ditemukannya pelaksana kebijakan yang merokok pada kawasan tanpa rokok.
2. Variabel sumber daya terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Pada sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa sudah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok sudah mempunyai sumber daya manusia yang baik dan cukup. Hal tersebut dilihat dari telah dibentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Dalam hal sumber daya anggaran dan fasilitas juga sudah mencukupi. Hal tersebut karena anggaran yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan sosialisasi dan

pemasangan tanda larangan merokok.

3. Dalam hal disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok, dapat dikatakan masih tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pelaksananya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pelaksana kebijakan yang merokok di kawasan tanpa rokok.
4. Dalam struktur birokrasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta koordinasi tertinggi berada pada Kepala Dinas. Dinas Kesehatan mempunyai struktur yang tidak berbelit-belit. Sehingga koordinasi antar bagian mudah untuk dilaksanakan. Kemudian mengenai SOP, kebijakan kawasan tanpa rokok belum mempunyai SOP. Belum adanya regulasi berupa SOP yang mengatur bagaimana cara masyarakat melapor apabila melihat adanya pelanggaran dalam kebijakan tersebut membuat kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan keempat indikator dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok hanya di dukung sepenuhnya dari sumber daya. Sedangkan tiga variabel lainnya belum dapat terlaksana dengan baik

sehingga implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum dapat mencapai sasaran.

Faktor pendukung dari Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta adalah sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sedangkan faktor penghambat ini lebih kepada sulitnya untuk mengubah kebiasaan merokok masyarakat, masih adanya pedagang rokok di kawasan tanpa rokok dan belum adanya upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Serta mudahnya masyarakat mengakses iklan rokok juga menghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Selain itu tidak adanya SOP merupakan faktor penghambat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut dilakukan serangkaian upaya yang baik itu dari pemerintah maupun dari gerakan masyarakat sendiri. Dari sisi pemerintah, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga membuat klinik berhenti merokok. Selain itu mengatasi faktor penghambat juga datang dari gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat tersebut sering

disebut dengan RW bebas asap rokok.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai penanggung jawab utama dalam kebijakan kawasan tanpa rokok sebaiknya melakukan penguatan dalam implementasi Perwal tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut dapat dimulai dari sosialisasi yang optimal dengan model dan strategi yang dapat diterima oleh warga masyarakat. Selain itu, pemerintah harus menjadi contoh bagi warga masyarakat dalam implementasi KTR, baik di lingkungan perkantoran, rumah dan lingkungan lainnya.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya membuat aturan-aturan yang mendukung berjalannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Aturan tersebut dapat berupa pelarangan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan rokok. Tentunya dengan pengawasan secara berkala dari Pemerintah Kota Yogyakarta

sehingga tujuan dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tercapai.

3. Bagi masyarakat, disarankan agar masyarakat memahami betul tentang bahaya merokok dengan membentuk kawasan tanpa rokok sesuai kesepakatan seluruh unsur masyarakat secara sadar dan mandiri. Hal yang dapat dilakukan secara mudah oleh masyarakat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan saling menghormati antara perokok dan yang tidak merokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Noviyanti. 2014. *Proses Formulasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM
- Moleong, J Lexy, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT RemajaRosdakarya
- Subarsono AG.2013. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Yogya Peringkat 4 Perokok Nasional. Dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1007456/151/yogya-peringkat-4-perokok-nasional-1433128312> pada 17 Oktober 2016.